



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/419/KEP/01.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR: 180.182/375/KEP/01.02/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/248/KEP/01.02/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terdapat Peraturan Bupati yang perlu ditambahkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025, sehingga Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/248/KEP/01.02/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/248/KEP/01.02/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati:
- a. Nomor: 180.182/92/KEP/01.02/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025; dan
  - b. Nomor: 180.182/248/KEP/01.02/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/375/KEP/01.02/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/419/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR: 180.182/375/KEP/01.02/2024 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1	2	3
1	Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat	Bagian Pemerintahan
2	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan
3	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Bagian Hukum
4	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum	Bagian Hukum
5	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bagian Kesra
6	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bagian Kesra

1	2	3
7	Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
8	Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi serta Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
9	Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) pada Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
10	Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
11	Pedoman Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
12	Restrukturasi, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Privatisasi, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran, Pemisahan, Kepailitan dan Tingkat Kesehatan pada Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
13	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	Bagian Administrasi Pembangunan
14	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	Bagian Administrasi Pembangunan
15	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun 2026	Bagian Administrasi Pembangunan
16	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjuang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025	Bagian Umum
17	Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2026	Bagian Umum
18	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan	Bagian Organisasi
19	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Bagian Organisasi

1	2	3
20	Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian Organisasi
21	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bagian Organisasi
22	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Bagian Organisasi
23	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia	Bagian Organisasi
24	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Bagian Organisasi
25	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan	Bagian Organisasi
26	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	Bagian Organisasi
27	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Bagian Organisasi
28	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Organisasi
29	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Bagian Organisasi
30	Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bagian Organisasi
31	Road Map Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
32	Indikator Kinerja Utama	Bagian Organisasi

1	2	3
33	Tata Cara Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD
34	Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026	Inspektorat
35	Penggabungan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Pembiayaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Pengadaan Barang/ Jasa pada Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan yang Telah Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
39	Pengelolaan Kerjasama pada Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan yang Telah Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
40	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025	Dinas Kesehatan
41	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
42	Integrasi Layanan Primer Magelang Melayani Orang Sehat (ILP-MOS)	Dinas Kesehatan
43	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
44	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	Standar Harga Satuan Tertinggi Tahun 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Strategi Sanitasi Kabupaten Magelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3
48	Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Ketentuan dan Tata Cara Persetujuan Rencana Tapak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
51	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52	Rencana Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
53	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
54	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Magelang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
55	Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
56	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
57	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
58	Tenaga Kesejahteraan Kecamatan	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
59	Pemberian Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
60	Tata Cara Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3
61	Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
62	Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
63	Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magelang	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
64	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup
65	Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
66	Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
67	Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2028	Dinas Lingkungan Hidup
68	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
69	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
70	Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
71	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
72	Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3
73	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
74	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
75	Penetapan Batas Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
76	Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
77	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
78	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
79	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
80	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan
81	Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
82	Masterplan Smart City Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
83	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
84	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3
85	Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
86	Rencana Induk Pelaksanaan <i>E-Government</i> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
87	Pengelolaan Domain dan Subdomain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
88	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
89	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinas Komunikasi dan Informatika
90	Izin Penyelenggaraan Reklame	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
91	Rencana Umum Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
92	Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
93	Kode Klasifikasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
94	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
95	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
96	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
97	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1	2	3
98	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
99	Kawasan Agribisnis Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
100	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
101	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
102	Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan cuti kepada ASN	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
103	Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
104	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
105	Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
106	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
107	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
108	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
109	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
110	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3
111	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
112	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
113	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
114	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
115	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
116	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
117	Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
118	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
119	Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Magelang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
120	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
121	Penanganan Anak Tidak Sekolah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
122	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
123	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

1	2	3
124	Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
125	Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
126	Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
127	Kebijakan Strategis Pelayanan Air Minum Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
128	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
129	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
130	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
131	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Umpak Sumbing	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
132	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Manunggal Jaya	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
133	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
134	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
135	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3
136	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
137	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
138	Jalur Evakuasi Bencana Gunung Merapi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
139	Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di Rumah Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	RSUD Muntilan
140	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2025-2029	RSUD Muntilan
141	Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Tahun 2025-2029	RSUD Merah Putih
142	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Tahun 2025-2029	RSUD Merah Putih
143	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul	RSUD Candi Umbul

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI